

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik berdasarkan pandangan masyarakat umum sering kali dipandang sebagai organisasi yang dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta, sehingga kedudukannya dianggap lebih rendah dan tertinggal jauh dibandingkan dengan sektor swasta.<sup>1</sup> Ketidakefisienan dan lambatnya perkembangan organisasi ini disebabkan oleh manajemen organisasi pada kebanyakan organisasi sektor publik yang masih lemah, dan bahkan dianggap tidak penting. Hal ini terjadi karena organisasi sektor publik merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu, sehingga kemajuan dan perkembangan organisasi tergantung dari kesadaran dan perhatian masyarakat tersebut terhadap manajemen organisasi, termasuk praktik pengelolaan keuangan atau akuntansinya. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi Gereja.

Gereja atau paroki merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik, yang berorientasi pada kepentingan publik, dan tidak berorientasi pada mencari laba atau keuntungan. Tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan umat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya.<sup>2</sup> Akuntabilitas keuangan bagi setiap organisasi, baik privat maupun organisasi publik non pemerintah, termasuk organisasi Gereja, menjadi salah satu faktor yang memungkinkan organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuan termaksud.

Gereja merupakan suatu lembaga nonprofit yang memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta benda mencapai tujuannya, seperti mengatur ibadah Ilahi, memberikan sustentasi atau sumbangan ke biara-biara, melaksanakan karya amal kasih terutama untuk yang berkekuranga.<sup>3</sup> Manajemen

---

<sup>1</sup> Muhamad Syam Kusufi, "Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah: Studi Pada Akuntansi Masjid" (Penyunting), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 442.

<sup>2</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 3.

<sup>3</sup> Kitab Hukum Kanonik, *Penerj. V. Kartosiswoyo et.al., Cet. I.* (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 348.

atau pengelolaan keuangan Gereja mengadopsi dari manajemen keuangan bisnis. Namun, dalam praktiknya selalu mengandalkan kuasa Tuhan.<sup>4</sup>

Terobosan digital tidak menutup kemungkinan dalam pengelolaan harta benda, dalam hal ini keuangan tetap diperlukan tenaga manusia. Para pengelola atau bendahara harus bersikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, akuntabel, transparan dan berintegritas. Mereka harus melaksanakan pertanggungjawaban sesuai pedoman yang berlaku. Dalam buku *Spirituality of Finance Management* dijelaskan bahwa seorang pengelola atau bendahara harus memenuhi kriteria sebagai orang yang memiliki karunia rohani, seperti:

- 1) Karunia spiritual administrasi, yaitu jujur dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi proses yang terlibat dalam pengelolaan pengumpulan, pencatatan dan penyetoran pendapatan, penyerahan formulir pajak yang diperlukan, pembayaran tagihan dan gaji, bantuan dalam persiapan anggaran tahunan, dll;
- 2) Karunia bantuan spiritual, yaitu responsif terhadap apa yang perlu dilakukan administrator, sambil mempertahankan sikap sebagai pelayan, menghormati para pemimpin yang dilayani;
- 3) Karunia pelayanan rohani adalah bekerja di belakang layar, seperti menghitung dan atau mencatat kolekte, memilah-milah pemasukan di bank sesuai dengan posnya.<sup>5</sup>

Gereja memiliki struktur organisasi, yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi yang saling terkoordinasi. Struktur organisasi tersebut memerlukan adanya suatu pengendali internal yang memadai. Struktur internal yang diterapkan dalam organisasi Gereja dapat memungkinkan fungsi pengawasan dan fungsi koordinasi yang baik, serta mampu mendeteksi adanya penyimpangan. Informasi tentang pengendalian internal ini berkaitan erat dengan laporan keuangan. Ia berpengaruh pula ke masa depan karena pengendalian internal yang efektif akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang. Selain bermanfaat bagi organisasi, struktur pengendalian internal ini juga memegang peranan penting dalam proses audit.

Akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang lahir karena adanya hubungan antara organisasi dan

---

<sup>4</sup> Hamm, *Train Church Leader, Finding Spiritual Meaning in Good Personal Finance Practices* (USA: Majalah Two Cent, 2018) Retrieved from [//www.thesimpledollar.com/financial-wellness/finding-spiritual-meaning-in-good-personal-finance-practices/](http://www.thesimpledollar.com/financial-wellness/finding-spiritual-meaning-in-good-personal-finance-practices/).

<sup>5</sup>Jacob Peenikaparambil, *Spirituality of Finance Management* (Matters India: Indias Complete Socioeconomic & Religious News, 2019), hlm. 59-60.

masyarakat. Organisasi Gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, semua organisasi nirlaba harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada para pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, Gereja juga, sebagai sebuah organisasi nirlaba, harus dan berhak membuat laporan keuangan yang akuntabel dan melaporkannya kepada pemakai laporan keuangan Gereja.<sup>6</sup> Laporan keuangan yang akuntabel merupakan hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita entitas atau organisasi tertentu. Akuntabilitas ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua aspek.<sup>7</sup> Indikator kinerja itu sendiri juga mempunyai sifat yang transparan dan akuntabel yang menurut Teguh Kurniawan bahwasannya indikator dalam transparansi dan akuntabel ada beberapa hal yakni;

*Pertama*, bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan juga organisasi tertentu. *Kedua*, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan juga organisasi tertentu. *Ketiga*, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. *Keempat*, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan baik undang-undang pemerintahan maupun perundang-undangan organisasi tertentu.<sup>8</sup>

Bila ditelisik lebih jauh, Gereja sudah sejak awal berdirinya memiliki keberkaitan dengan uang dan harta benda. Namun, hal ini masih dipandang sebagai suatu keanehan karena Gereja, oleh orang-orang ‘awam’ dipandang sebagai entitas ilahi, yang mesti terpisah dari harta benda. Pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah mengapa agama (Gereja) sebagai institusi ilahi harus direpotkan dengan urusan mamon atau uang yang bertentangan dengan cita-cita agama, yang selalu terarah kepada hal-hal surgawi? Sejatinnya,

---

<sup>6</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba- PSAK No. 45”, (ms), (Jakarta, 23 Desember 1997), hlm. 2.

<sup>7</sup> Rudianto, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 68.

<sup>8</sup> Teguh Kurniawan, *Akuntabilitas Transparansi Dan Pengawasan* (Yogyakarta: Media Press, 2009), hlm. 48.

pemahaman yang keliru ini berimbas pada lahirnya keyakinan bahwa praktik yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan uang dan harta benda lainnya sebagai hal yang lumrah. Justru, yang menjadi persoalannya di sini ialah mengenai pemanfaatan uang dan harta benda yang cenderung menyeleweng.

Perlu diingat bahwa Gereja merupakan sebuah institusi yang berdimensi ilahi, tetapi serentak pula ia berada di dunia dan menjadi bagian dari dunia ini. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghindar dari hal-hal yang bersifat duniawi. Jika Gereja hanya menyelubungi diri dengan cangkang dogma-dogma kesucian dan tidak meleburkan diri dalam dunia, ia bukanlah Gereja yang sejati. Gereja tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi dunia. Pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja merupakan satu hal yang selalu beriringan bersama pertumbuhan Gereja, dan menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Uang dan harta benda juga turut mewarnai perjalanan Gereja, bahkan akan terasa naif apabila seorang Katolik selalu menghindar dari uang dan hanya berkutat pada ritus-ritus di tengah beragam tuntutan hidup yang dinamis.

Perhatian Gereja terhadap pengelolaan harta benda gerejawi sangat besar. Di samping hukum Gereja mewajibkan adanya Dewan Keuangan di setiap Paroki untuk mengelola keuangan dan harta benda, pengelolaan ini juga membantu karya-karya pastoral Gereja paroki. Dewan Keuangan Paroki, sebagaimana termuat dalam buku *Tata Laksana Karya Pastoral bagi Pastor Paroki*, no. 309, tentang fungsi Dewan Keuangan Paroki yang mesti menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan harta benda paroki. Seksi ini harus mengerti seluk-beluk urusan keuangan. Seksi keuangan dan harta benda paroki dan keperluan-keperluan dewan paroki berpegang pada Kan. 1284, dan bertanggungjawab untuk membuat laporan keuangan bulanan paroki kepada Dewan Pastoral Paroki.<sup>9</sup>

Dalam membuat laporan keuangan, ilmu akuntansi sangat diperlukan di berbagai sektor atau organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, perseorangan, maupun organisasi nirlaba. Tujuannya ialah untuk memperoleh data-data keuangan dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan sehingga dapat dijadikan landasan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan. Pihak-

---

<sup>9</sup> Para Uskup, *Tata Laksana Karya Pastoral Bagi Pastor Paroki* (Jakarta, 1990), hlm. 147.

pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan terbagi menjadi dua kelompok yakni pihak internal dan pihak eksternal.

Pihak internal adalah kelompok yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas organisasi (Gereja) sehari-hari, yaitu manajemen. Akuntansi bagi manajemen merupakan alat untuk menjalankan aktivitas maupun menjalankan fungsi manajerial suatu perusahaan maupun organisasi. Melalui akuntansi, aktivitas perusahaan masa lalu, sekarang, dan prospek masa yang akan datang dapat diketahui. Sedangkan pihak eksternal adalah kelompok yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas organisasi sehari-hari, tetapi berkepentingan terhadap organisasi, seperti investor, karyawan, masyarakat, dan pelanggan. Hasil dari proses dalam akuntansi berupa laporan keuangan itu berisikan informasi keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan dengan kemungkinan adanya penyimpangan (bias), salah penafsiran, dan ketidakakuratan data-data. Kesalahan pengelolaan keuangan menimbulkan persoalan besar. Kasus-kasus besar, seperti korupsi dan kebangkrutan perusahaan dan organisasi sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan ini. Hal-hal yang menimbulkan masalah keuangan, antara lain; catatan-catatan peristiwa keuangan yang tidak jelas, tidak adanya prosedur yang jelas dalam penerimaan dan pengeluaran uang, tidak ada bukti penerimaan dan pengeluaran yang jelas (kwitansi, nota, perintah bayar, *voucher*, dan lain-lain), bendahara tidak segera membuat laporan keuangan, tidak melaporkan keuangannya secara rutin, pengurus atau pimpinan tidak pernah memeriksa pekerjaan bendahara, dan peminta dana tidak membuat laporan pemanfaatannya.

Persoalan keuangan yang paling besar adalah mengenai proses pengelolaan keuangan yang dipegang oleh pimpinan organisasi sendiri tanpa adanya aspek transparansi. Sebagai tindakan preventif agar persoalan seputar keuangan tidak muncul atau terulang kembali, diperlukannyalah manajemen dan akuntansi keuangan, yang disebut dengan nama 'tata kelola keuangan'. Tata kelola keuangan atau pengelolaan harta milik dan keuangan paroki berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1.) Harta benda paroki diperoleh, dimiliki dan diurus, dengan mengindahkan prinsip-prinsip kristiani dalam Kan. 1254-§ 2.

- Begitupun prinsip-prinsip yang sama harus dipakai bilamana harta benda paroki mau dipindah-tangankan atau dijual-belian.
- 2.) Harta benda paroki diperoleh melalui pembelian, penghasilan, kolekte, derma, sumbangan atau pemberian yang halal, atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam nomor 1.).
  - 3.) Batas-batas penerimaan dan pengeluaran ditentukan oleh Dewan Pastoral Paroki.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan peranan akuntabilitas keuangan paroki, diperlukan suatu sistem pengelolaan dan pengaturan keuangan yang baik. Pengaturan pengelolaan keuangan paroki dikatakan baik apabila semua sistem yang bekerja di bagian keuangan tersebut mampu bekerja sama dan mampu bekerja sesuai dengan sistem yang telah disepakati atau ditentukan. Hal itu berarti bahwa akuntabilitas keuangan yang baik dan jelas atau yang akuntabel dan transparan bisa menunjang Gereja menuju Gereja yang mandiri. Kemandirian Gereja lokal tampak dalam, sekurang-kurangnya, kemandirian paroki-paroki di bidang pengelolaan keuangan. Pastor paroki memiliki tanggung jawab untuk menyadarkan umat tentang kemandirian itu agar umat dapat dengan rela memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup parokinya.

Cara memperoleh dana haruslah dengan mempertimbangkan kesanggupan umat dan pengelolaannya harus terbuka. Selain itu, gaya hidup pastor ikut mempengaruhi umat dalam usaha menuju Gereja mandiri.<sup>11</sup> Dalam meminimalisasikan kemungkinan penyimpangan, akuntansi telah berupaya untuk mengembangkan suatu aturan maupun prosedur yang dapat dipakai. Setiap organisasi, baik itu organisasi sektor publik non pemerintah (Gereja), maupun swasta, harus menyesuaikan diri dengan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berlandaskan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi nirlaba, Gereja Katolik, dalam pelaporan keuangan, berpedoman pada PSAK 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang membuat laporan keuangan adalah Gereja dan atau paroki. Paroki adalah komunitas kaum beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular, yang reksa

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

pastoralnya berada di bawah otoritas Uskup Diosesan, yang dipercayakan kepada pastor-pastor sebagai gembalanya. Paroki juga merupakan persekutuan paguyuban-paguyuban umat beriman sebagai bagian dari Keuskupan dalam batas-batas wilayah tertentu yang sudah memiliki Pastor Kepala, yang berdomisili di Parokinya sendiri.<sup>12</sup>

Keuskupan Maumere adalah keuskupan sufragan<sup>13</sup> pada Provinsi Gerejawi Keuskupan Agung Ende, yang berpusat di kota Maumere. Keuskupan ini mencakup wilayah Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Keuskupan Maumere didirikan pada 14 Desember 2005, yang memisahkan diri dari Keuskupan Agung Ende. Keuskupan Maumere baru berumur 17 tahun pada tanggal 14 Desember 2022. Usia ini masih terbilang muda, tetapi sesungguhnya komunitas Katolik di keuskupan ini mempunyai sejarah yang panjang.<sup>14</sup> Wilayah Keuskupan Maumere sama dengan wilayah administratif pemerintah Kabupaten Sikka. Luas wilayahnya yakni 1731,91 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk saat berdirinya sekitar 276.000 jiwa. Kurang lebih 91% penduduknya beragama Katolik. Keuskupan Maumere terdiri atas 38 Paroki.<sup>15</sup> Dari 38 Paroki yang ada dalam wilayah Keuskupan Maumere peneliti membatasi diri untuk melakukan penelitian pada Paroki Santo Yosef Wairpelit. Informasi singkat tentang paroki Santo Yosef Wairpelit ini akan diuraikan secara garis besar. Paroki Santo Yosef Wairpelit, tidak memiliki stasi, tetapi lingkungan. Sampai dengan sekarang ini, April 2017, terdapat 8 lingkungan dan 53 KBG.<sup>16</sup>

Paroki-paroki di Keuskupan Maumere, terlebih khusus paroki Santo Yosef Wairpelit di atas, dapat dikatakan sebagai organisasi nirlaba karena

---

<sup>12</sup> Kitab Hukum Kanonik, *op cit.*, hlm. 167.

<sup>13</sup> Keuskupan Sufragan adalah istilah yang hanya digunakan dalam relasi dengan Keuskupan Agung, yaitu beberapa Keuskupan yang menyatukan diri dalam suatu Provinsi Gerejani. Kedudukan Keuskupan sufragan secara hukum (Gereja) adalah setara dengan Keuskupan Agung, maka relasi antara Keuskupan Agung dan Keuskupan sufragan bukan merupakan atasan-bawahan, melainkan mitra-kerja penggembalaan umat yang lebih luas. [https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Keuskupan\\_159652-eduNitas.html](https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Keuskupan_159652-eduNitas.html). Diakses pada hari Selasa 27 Juli 2023.

<sup>14</sup> Hubert Thomas Hasulie dan Yanuarius Hilarius Role, ed., *Keuskupan Maumere: Beriman, Sejahtera, Solider Dan Membebaskan Dalam Terang Sabda Allah. Rencana Strategis Pastoral 2023-2027* (Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere & Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, 2023), hlm. 26.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Gregorius Sabon Kai Luli, *Belajar Berdiri Di Usia Emas Buku Kenangan 50 Tahun Paroki Santu Yosef Wairpelit 1 Mei 2017*, (Poma: Kom Rein Press, 2017), hlm. 25.

memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari Paroki tersebut. Kendatipun tidak mengharapkan imbalan apapun, para penyumbang dan para anggota (umat) membutuhkan informasi yang transparan tentang keberadaan dan kondisi dari Paroki yang disumbanginya.

Dalam tulisan ini penulis berusaha membuat studi kasus paroki Santo Yosef Wairpelit untuk mengetahui, sekaligus melihat praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan dari paroki tersebut. Lebih dari itu, penulis hendak mengkaji seberapa besar nilai akuntabilitas atau nilai tanggung jawab yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan sebab Gereja bertanggungjawab untuk mewujudkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang melatarbelakangi konsep transparansi dan akuntabilitas. Saat ini Gereja semakin dituntut untuk mengelola uang dan harta benda miliknya secara kredibel: transparan dan akuntabel. Penulis merumuskan studi dan pembahasan-pembahasan dalam judul **PERAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PAROKI SEBAGAI USAHA DALAM MEMBANGUN GEREJA YANG MANDIRI DI PAROKI SANTO YOSEF WAIRPELIT BERDASARKAN KHK TENTANG PENGELOLAAN HARTA BENDA DAN IMPLIKASINYA BAGI KARYA PASTORAL PAROKI.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan utama bagi peneliti adalah bagaimana peran akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dalam usaha membangun Gereja yang mandiri berdasarkan KHK tentang Pengelolaan Harta Benda dan apa implikasinya bagi karya pastoral Gereja? Persoalan ini akan diuraikan dalam beberapa poin berikut.

*Pertama*, Apa itu akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dan peranannya dalam membangun Gereja yang mandiri?

*Kedua*, Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dalam KHK Gereja Katolik tentang Pengelolaan Harta Benda?

*Ketiga*, Bagaimana profil Paroki Santo Yosef Wairpelit dan implikasinya bagi karya pastoral paroki sesuai dengan KHK?



### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### 1.) Tujuan Umum

Secara umum, penulisan tesis ini bertujuan; *Pertama*, untuk mengetahui apa itu akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dan peranannya dalam membangun Gereja yang mandiri, secara khusus pada Paroki Santo Yosef Wairpelit sebagai entitas publik yang membawa misi keselamatan bagi anggota-anggotanya melalui praktik-praktik pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. *Kedua*, untuk menjelaskan norma-norma atau prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dalam KHK Gereja Katolik. *Ketiga*, untuk menjelaskan implikasi akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki yang dijalankan di Paroki Santo Yosef Wairpelit seturut KHK bagi karya pastoral paroki sebagai usaha dalam membangun Gereja yang mandiri. *Empat*, memberikan gambaran umum tentang paroki Santo Yosef Wairpelit

#### 2.) Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Teologi dengan pendekatan kontekstual pada Program Studi Teologi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun tema penulisan tesis ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, bagi Gereja sebagai institusi, penelitian ini membantu pengelolaan keuangan Gereja dan harta benda paroki agar pengelolaan keuangan dan harta benda paroki hendaknya sesuai dengan tujuan, agar citra dan nama baik Gereja tetap terbina. Semua lembaga gerejani hendaknya selalu memperhatikan, bahwa Gereja, termasuk paroki, adalah persekutuan umat yang didasarkan kasih, untuk saling memperhatikan dan menolong. Tanggungjawab bersama serta kerja sama dalam bidang keuangan dan harta benda hendaknya berperan dalam menampilkan wajah Gereja di tengah-tengah masyarakat.

*Kedua*, bagi Pastor Paroki, penelitian ini membantu dan menyadarkan kembali pastor paroki agar mampu bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan harta benda paroki baik dari lingkup wilayah, lingkungan, stasi maupun lingkup yang lebih besar yakni paroki itu sendiri. Pastor paroki

bertanggungjawab menyadarkan umat tentang kemandirian Gereja dengan rela memberikan dana bagi kelangsungan hidup parokinya. Cara memperoleh dana haruslah dengan mempertimbangkan kesanggupan umat dan pengelolaannya harus terbuka. Selain itu gaya hidup seorang pastor paroki ikut mempengaruhi umat dalam usaha menuju paroki yang mandiri.

*Ketiga*, bagi Dewan Keuangan Paroki (DKP), penelitian ini membantu para DKP dan anggota DKP agar dalam mengambil tindakan atau keputusan mengenai pengelolaan keuangan harus didasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan yang berlandaskan nilai cinta kasih Kristiani seperti: kejujuran, transparan dan akuntabel. Akuntabel adalah suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Fungsi dewan keuangan paroki dijalankan oleh seksi keuangan dalam dewan pastoral paroki, dalam hal ini adalah bendahara paroki.

*Keempat*, bagi bendahara atau pengelola keuangan, penelitian ini membantu bendahara atau pengelola keuangan paroki dan harta benda paroki agar mampu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pastor Paroki, DPP, dan juga kepada umat dengan membuat laporan keuangan yang bersifat transparan dan juga akuntabel. Dalam hal ini, bendahara sebagai pengelola utama dalam mengelola keuangan dan harta benda paroki dan keperluan-keperluan dewan paroki harus berpegang pada prinsip dan norma-norma keuangan yang baik yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Penelitian ini juga sekaligus menyadarkan bendahara atau pengelola keuangan dan harta benda paroki agar mengerti dan paham betul tentang seluk beluk keuangan, sebagaimana fungsi dewan keuangan paroki dijalankan oleh seksi keuangan dalam dewan pastoral paroki tersebut.

*Kelima*, bagi Gereja sebagai umat Allah, penelitian membantu Gereja dalam hal ini Umat Allah agar mampu menyadari pentingnya sikap solidaritas antarumat dalam memberikan sumbangan untuk membiayai paroki dan juga membiayai keperluan-keperluan Gereja di tempat lain. Penelitian ini juga menyadarkan umat bahwa kemandirian paroki adalah bukan semata dari paroki itu sendiri melainkan kontribusi umat sepenuhnya mengenai hak Gereja atas sumbangan mereka.

*Keenam*, bagi penulis yang merupakan agen pastoral dan juga sebagai generasi penerus Gereja. Penelitian ini menyadarkan dan membantu penulis agar tidak hanya sekedar untuk melakukan penelitian semata akan tetapi akan mempraktikkan dan juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau umat Allah mengenai cara mengelola keuangan yang baik dan benar berdasarkan nilai-nilai iman Kristiani.

## **1.5 Metode Penelitian**

Dalam usaha mengerjakan tesis ini, penulis menggunakan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menjabarkan landasan teoritis dan bingkai analisis tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dalam usaha membangun Gereja yang mandiri di Paroki Santo Yosef Wairpelit dan implikasinya bagi karya pastoral paroki sesuai dengan KHK. Dalam penelitian lapangan, penulis membagi kuesioner dan mengadakan wawancara dengan para informan kunci sebagai instrumen pengumpulan data terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dalam usaha membangun Gereja yang mandiri di Paroki Santo Yosef Wairpelit.

### **1.5.1 Sumber Data Dan Prosedur Pengumpulan Data**

Ada dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan wawancara. Sementara data sekunder adalah data dan informasi dari dokumen-dokumen paroki yang relevan dengan penelitian ini, yaitu dokumen dari kantor sekretariat Paroki Santo Yosef Wairpelit. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik kuesioner, dan wawancara. Adapun responden pada metode kuesioner dalam penelitian ini adalah umat dari setiap lingkungan. Dengan kata lain, responden dalam penelitian ini sekaligus juga merupakan populasi penelitian. Jumlah umat di paroki ini tergolong banyak maka penentuan responden dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *quota non-probability sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memperhitungkan aspek keterwakilan. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah Pastor Paroki, Anggota DPP, DKP dan Bendahara.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi seputar Peran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Paroki Sebagai Usaha Dalam Membangun Gereja Yang Mandiri Di Paroki St. Yosef Wairpelit Berdasarkan KHK Tentang Harta Benda Gereja Dan Implikasinya Bagi Karya Pastoral Paroki, penulis menggunakan kuesioner dan wawancara. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dan informasi dari kantor sekretariat paroki Wairpelit mengenai pengelolaan keuangan paroki. Selanjutnya, penulis mengolah dan menganalisis data dan informasi yang terkumpul itu untuk mengetahui peran akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki sebagai usaha dalam membangun Gereja yang mandiri berdasarkan KHK tentang harta benda Gereja dan implikasinya bagi karya pastoral paroki.

#### 1.5.2 Instrumen Pengumpulan Data

##### 1.5.2.1 Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Penulis menggunakan pertanyaan tertutup supaya arah pikiran dan jawaban responden terarah serta jelas. Pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan peran akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki sebagai usaha dalam membangun Gereja yang mandiri berdasarkan KHK tentang harta benda Gereja dan implikasinya bagi karya pastoral paroki.

##### 1.5.2.2 Wawancara

Untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui kuesioner, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci, yaitu pastor paroki dan mantan pastor paroki, ketua dewan keuangan paroki dan bendahara keuangan paroki. Melalui wawancara, penulis mendapatkan pelbagai informasi secara lisan dan langsung dari beberapa informan tentang pokok persoalan penelitian.

## **1.6 Hipotesis**

Bertolak dari pokok permasalahan yang diangkat penulis, maka penulis membuat hipotesis bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki berperan penting untuk membangun Gereja yang mandiri sesuai dengan KHK tentang pengelolaan harta benda Gereja.

## 1.7 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Studi

Dari segi tema, penelitian ini fokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki sebagai usaha dalam membangun Gereja yang mandiri di Santo Yosef Wairpelit ditilik dari KHK tentang pengelolaan harta benda dan implikasinya bagi karya pastoral paroki. Subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah Pastor Paroki, Dewan Keuangan Paroki dan perwakilan umat dari setiap lingkungan di paroki Santo Yosef Wairpelit. Pemilihan responden atau subjek penelitian ini sudah ditentukan oleh pastor paroki di paroki. Sasaran penelitian terbatas pada ketentuan-ketentuan Kitab Hukum Kanonik tentang pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja dalam hal-hal berikut:

*Pertama*, Pendampingan oleh Dewan Keuangan Keuskupan ( Kan.492-494) dan Dewan Keuangan Paroki.

*Kedua*, Pembedaan antara pengelolaan biasa dan luar biasa ( Kan. 1281).

*Ketiga*, Perlunya inventaris ( Kan. 1283)

*Keempat*, Perincian tugas-tugas dan perlunya penyusunan anggaran belanja tahunan ( Kan. 1284 § 2).

*Kelima*, Penentuan batas-batas pengeluaran uang (Kan. 1285)

*Keenam*, Peraturan mengenai kontrak ( Kan. 1286)

*Ketujuh*, Laporan pertanggungjawaban tahunan kepada uskup ( Kan. 1287).

Lokus penelitian penulis adalah di Gereja Santo Yosef Wairpelit sebagai salah satu paroki yang mewakili semua paroki di wilayah Keuskupan Maumere. Data yang akan dikumpulkan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik tentang pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja. Penulis memperoleh data dengan cara membuat kuesioner dan juga mewawancarai para pengelola keuangan atau bendahara, anggota dewan keuangan dan pastor paroki. Dari data dan informasi yang dikumpulkan, penulis akan menarik kesimpulan yang jelas tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dalam usaha membangun gereja yang mandiri di Paroki Santo Yosef Wairpelit dan implikasinya bagi karya pastoral paroki sesuai dengan KHK.

## **1.8 Mekanisme dan Proses Penelitian**

Ada beberapa mekanisme dan proses kerja dalam penyelesaian tesis ini.

*Pertama*, tahapan persiapan. Penulis menetapkan dan mengajukan tema penulisan lalu mengadakan pendekatan dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penelitian.

*Kedua*, penyusunan proposal penelitian.

*Ketiga*, pengumpulan data. Penulis menyebarkan kuesioner dan mengadakan wawancara dengan para informan kunci sebagai instrumen pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki dalam usaha membangun Gereja yang mandiri di Paroki Santo Yosef Wairpelit sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik tentang pengelolaan harta benda Gereja.

*Keempat*, melakukan studi kepustakaan untuk mendalami akuntabilitas pengelolaan keuangan Gereja sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik tentang pengelolaan dan harta benda Gereja.

*Kelima*, menarik kesimpulan tentang sejauh mana peranan akuntabilitas keuangan paroki dalam membangun gereja yang mandiri sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik tentang pengelolaan harta benda Gereja.

## **1.9 Sistematika Penelitian**

Penulisan tesis ini dijabarkan menurut skema pembahasan berikut:

*Pertama*, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan studi, metode penelitian, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan.

*Kedua*, pembahasan tentang Tinjauan KHK Tentang Pengelolaan Harta Benda.

*Ketiga*, Hasil Penelitian dan pembahasan serta implikasi hasil penelitian tentang akuntabilitas keuangan paroki dalam usaha membangun Gereja yang mandiri bagi karya pastoral paroki.

*Keempat*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.